

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN (LPMK) DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN
(Studi Pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan
Lesung Kabupaten Pelalawan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh:

**JUPRIADI
NPM : 167310183**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Jupriadi
NPM : 167310183
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)


Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, Juni 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tunjuk ajarnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dan meluangkan waktunya dalam pengumpulan data penelitian penyusunan skripsi.
6. Masyarakat Kelurahan Pangkalan Lesung yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dalam pengumpulan data penelitian ini.
7. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, Juni 2021

Ttd

Jupriadi
NPM: 1673101803

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
SURAT PERNYATAAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Teori Pemerintahan	11
2. Konsep Kelurahan	14
3. Teori Kebijakan.....	15
4. Teori Peranan	16
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.....	20
6. Perencanaan Pembangunan	21
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Pikiran.....	24
D. Konsep Operasional	25
E. Operasional Variabel.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN	28
A. Tipe Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Informan atau Subjek/Objek Penelitian	29
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian	29
E. Jenis dan Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Instrumen Penelitian.....	32
H. Uji Validitas Data.....	33
I. Teknik Analisis Data.....	34
J. Jadwal Waktu Penelitian	36

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Gambaran Singkat Kelurahan Pangkalan Lesung	38
1. Sejarah Kelurahan	38
2. Kondisi Wilayah	39
3. Keadaan Alam	39
4. Sosial Budaya	40
5. Jarak Geografis	40
6. Keadaan Demografi	41
B. Pemerintahan Kelurahan Pangkalan Lesung	43
1. Keadaan Aparatur Pemerintahan Kelurahan	43
2. Pembagian Rukun Tetangga dan Rukun Warga berdasarkan Lingkungan	45
3. Visi dan Misi Layanan	45
C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	46
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Identitas Informan	47
B. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	48
1. Perangkat Hak-Hak dan Kewajiban	49
2. Aspek Dinamis dari Kedudukan	58
3. Perilaku Sosial dan Fungsi Kedudukan	64
C. Hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	73
BAB VI : PENUTUP	78
A. Kesimpulan	79
B. Saran	
DAFTAR KEPUSTAKAAN	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pangkalan Lesung	6
I.2	Jenis Pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung Tahun 2019 dan 2020	7
II.1	Penelitian Terdahulu	23
II.2	Operasional Variabel Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan) ..	27
III.1	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)	37
IV.1	Jarak Kelurahan dengan Pusat Pemerintahan dan Tempat Umum	41
IV.2	Kependudukan Data Penduduk Kelurahan Pangkalan Lesung Tahun 2020	41
IV.3	Keadaan Penduduk Menurut Usia	42
IV.4	Jumlah Pendudukan Berdasarkan Agama	42
IV.5	Jenis Pekerjaan Penduduk Pangkalan Lesung	43
IV.6	Keadaan Pegawai Kelurahan Pangkalan Lesung	44
IV.7	Pembagian RW dan RT Dalam Lingkungan Kelurahan	45
IV.8	Keadaan LPM Kelurahan Pangkalan Lesung	46
V.1	Karakteristik Informan Penelitian	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)	25
III.1	Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	34
IV.1	Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pangkalan Lesung ..	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	82
2. Dokumentasi Penelitian	91
3. Surat Keterangan/Riset Penelitian	95



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jupriadi
 NPM : 167310183
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2021
 Pelaku Pernyataan,



Jupriadi
 NPM: 167310183

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)

Oleh:

JUPRIADI
NPM: 167310183

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga ditetapkan informan utama dan informan tambahan sebagai sumber informasi dalam pengumpulan data dengan teknik snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian seluruh data yang terkumpul dipisahkan sesuai indikator, lalu dianalisis secara mendalam dan selanjutnya untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa LMPK telah berperan dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung. Indikator perangkat hak-hak dan kewajiban ini telah dilaksanakan oleh LMPK dalam memerankan fungsinya sebagai lembaga mitra dari lurah. LMPK Kelurahan Pangkalan Lesung telah berperan dalam menyusun rencana pembangunan, telah menetapkan skala prioritas program pembangunan, dan mengusulkan program pembangunan. LPMK telah berperan dalam menjaga indikator aspek dinamis dari kedudukannya. LMPK telah menggali aspirasi dari masyarakat, mencermati pembangunan paling dibutuhkan masyarakat, memahami kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi. Adanya peran ini diwujudkan dengan adanya berbagai jenis pembangunan fisik yang dilaksanakan di Kelurahan Pangkalan Lesung baik bersumber dari dana pemerintah maupun dari swadaya yang berasal dari hasil usaha LMPK. Indikator perilaku sosial dan fungsi kedudukan LPMK telah berperan dalam menjalankan tugasnya pada turut serta merencanakan pembangunan dengan memperhatikan komunikasi, melakukan diskusi, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan, dan mencari solusi bersama.

Kata Kunci: Peran, LPMK, Perencanaan Pembangunan.

ABSTRACT

*THE ROLE OF KELURAHAN COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTIONS
(LPMK) IN DEVELOPMENT PLANNING IN KELURAHAN
(Study in Pangkalan Lesung Village, Pangkalan Lesung District, Pelalawan
Regency)*

By:

JUPRIADI
NPM: 167310183

This study aims to determine the role and obstacles of the Village Community Empowerment Institution (LPMK) in Development Planning in Pangkalan Lesung Village, Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency. This type of research is qualitative with a descriptive approach, so that the main informants and additional informants are determined as sources of information in collecting data using the snowball sampling technique. Data was collected by means of interviews, observation, and documentation. Then all the data collected is separated according to indicators, then analyzed in depth and then conclusions are drawn. The results of the study concluded that LMPK has played a role in development planning in Pangkalan Lesung Village. The indicators of this set of rights and obligations have been implemented by LMPK in playing its function as a partner institution of the lurah. LMPK Pangkalan Lesung Village has played a role in preparing development plans, has determined the priority scale of development programs, and proposed development programs. LPMK has played a role in maintaining indicators of the dynamic aspect of its position. LMPK has explored the aspirations of the community, observed the development most needed by the community, understood the most basic needs that must be met. The existence of this role is manifested by the existence of various types of physical development carried out in Pangkalan Lesung Village, both sourced from government funds and from self-help originating from LMPK's business results. Indicators of social behavior and the function of LPMK's position have played a role in carrying out their duties in participating in planning development by paying attention to communication, conducting discussions, evaluating strengths and weaknesses, and seeking joint solutions.

Keywords: Role, LPMK, Development Planning.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih di berdayakan sekaligus diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut. Salah satu bagian dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan sampai ke wilayah yang terkecil adalah kelurahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 229 Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala Kelurahan yang di sebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Wali kota atas usul

sekretaris daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang.

Kemudian dalam peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 1 ayat (2) menyatakan Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Di sini dapat terlihat bahwa Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang memimpin perangkat Kelurahan. Kelurahan sebagai salah satu bagian perangkat kecamatan dari pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan, juga perlu mengupayakan untuk mengelola segenap sumber daya pemerintahannya, dengan tujuan agar organisasi Kelurahan mampu mencapai tingkat kinerja yang optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembangunan serta pelayanan masyarakat pada umumnya.

Keberhasilan pembangunan Nasional terukur dari meratanya pembangunan sampai ke daerah-daerah maka dengan sendirinya akan terwujud pembangunan Nasional secara menyeluruh. Keikutsertaan masyarakat setempat juga merupakan hal penting dalam pembangunan di pedesaan dan kelurahan. Hal ini tentu ada keterikatan emosional terhadap lingkungan sekitarnya. Tentu saja masyarakat mengetahui kekayaan potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh daerahnya dan di samping itu pula masyarakat merupakan salah satu penggerak pembangunan di daerahnya.

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang terus menerus menuju ke arah perkembangan dan kemajuan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha

yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara. Adanya suatu pembangunan di wilayah tertentu berarti adanya usaha pemerintah untuk menuju ke arah perbaikan secara bertahap dan berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan harus secara komperhensif, baik itu secara fisik maupun pembangunan dari sumber daya manusianya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, meningkatkan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dalam Pasal 17 ayat (2) di sebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Kemudian keberadaan LPMK ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Dengan keberadaan LPMK di Kelurahan sebagai mitra Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka ditetapkan perencanaan pembangunan kelurahan dibahas bersama antara Lurah dengan LPMK. Pembahasan perencanaan

pembangunan di kelurahan diatur pada Permendagri No. 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) berikut:

(1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

(2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Sebagai satu lembaga yang didirikan di Kelurahan, maka LPMK memiliki tugas dan fungsi sebagai mitra dari Lurah dalam membantu pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Salah satu tugasnya adalah memberikan usulan pada pembangunan di kelurahan

Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek kelurahan. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembangunan dibatasi atas proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana yang ada di kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diawali dari musyawarah yang dilakukan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bersama setiap kepala lingkungan yang dipelopori oleh pihak kelurahan sebagai pihak yang menjadi fasilitator pembangunan. Selanjutnya hasil musyawarah yang telah dilakukan maka akan dibawa ke musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, di mana di sini akan dibahas mengenai pembangunan kelurahan yang akan dibangun. Dalam musyawarah yang akan dilakukan di kelurahan ini seluruh aspirasi yang ada akan dibahas. Selanjutnya dalam musyawarah ini akan dibahas pembangunan mana yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan nantinya, sehingga akan dapat menghindari pembangunan yang hanya akan menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat yang mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendali pembangunan.

Di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung telah dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Lurah Pangkalan Lesung Nomor: KPTS.410/K-PKL/2018/2021 mengenai Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dengan nama-nama masyarakat yang menduduki jabatan pengurus pada periode 2018-2021 yang telah ditetapkan dan di keluarkan SK sebagai berikut:

Tabel I.1 Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pangkalan Lesung

No.	Nama	Jabatan
1	Armalis, SH	Ketua
2	Mahyudin	Sekretaris
3	Raidar	Bendahara
4	Dede Iskandar, S.Pd	Seksi SDM dan Ekonomi Kerakyatan
5	Sian	Seksi Pemuda, Seni, Olahraga dan Pariwisata
6	Rizki Zulhernadi	Seksi Lingkungan Hidup
7	Yunita Indriani, S.Pd	Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Kesehatan
8	Risvan Akhir Roswandi, S.Sy	Seksi Pembangunan
9	Marhadi MR	Seksi Agama dan Sosial

Sumber: Kelurahan Pangkalan Lesung, 2020.

Berdasarkan data nama-nama LPM Pangkalan Lesung yang ditetapkan di atas memperlihatkan adanya keterwakilan gender yakni laki-laki sejumlah 7 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Dengan demikian dalam susunan organisasi LPM telah ada keterwakilan dari masing-masing gender, sehingga diharapkan seluruh aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik untuk mewujudkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan di kelurahan.

Hasil observasi lapangan di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pelaksanaan LPMK sebagai mitra dari lurah di dalam sistem pemerintahan kelurahan belum begitu menunjukkan hal-hal yang menuju pada orientasi pembangunan yang baik. Dapat dilihat dari salah satu lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan

Lesung Kabupaten Pelalawan yaitu LPMK yang memiliki peranan penting dalam pembangunan.

Kurang maksimalnya peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam hal ini menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat LPMK di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan belum menjalankan perannya sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai penggerak dalam pembangunan, dapat dilihat dalam penentuan jadwal rapat bersama setiap kepala lingkungan yang tidak jelas maka untuk penyampaian aspirasi masyarakat kurang efektif. Pihak LPMK juga kurang maksimal dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat karena berdasarkan penelitian bahwa LPMK kurang proaktif terhadap pembangunan fisik di Kelurahan Pangkalan Lesung.

Adapun data pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Pangkalan Lesung pada tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel I.2 Jenis Pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung Tahun 2019 dan 2020

No.	Jenis Kegiatan	
	2019	2020
1	Pembangunan Pos Ronda RT 001 RW 04	Pemasangan pavingblock taman Kecamatan Pangkalan Lesung
2	Pembangunan Pos Ronda RT 003 RW 03	Pemasangan pavingblock Kantor Lurah Pangkalan Lesung
3	Pemasangan teralis MA-Alkhairat	Pembuatan plang nama MA-Alkhairat
4	Pembangunan 2 Lokal Gedung MDA	Pembangunan Musholla MTs Al-Khairat
5	Pembangunan Kantor UED-SP	Pembangunan WC MA Al-Khairat
6	-	Pembangunan WC MTs Al-Khairat

Sumber: Kantor Lurah Pangkalan Lesung, 2021.

Dari hasil pengamatan penulis ada indikasi bahwa masalah peranan LPMK di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan belum terlaksana secara optimal, hal tersebut dilihat dari fenomena sebagai berikut :

1. Belum adanya usulan yang berasal dari LPMK Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Padahal dalam PP no. 17 Tahun 2018 Pasal 27 angka (2) disebutkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam hal ini perencanaan pembangunan.
2. Terindikasi kurang aktifnya anggota LPMK Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam memberikan masukan kepada lurah.

Berdasarkan pemaparan fenomena di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Studi pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas yang di maksud dengan LPMK Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan

Lesung Kabupaten Pelalawan adalah yang mempunyai fungsi penting guna terselenggaranya pemerintahan Kelurahan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan untuk menjawab permasalahan yang ada sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

2. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan kepada berbagai pihak berikut ini:

- a. Sebagai bahan pengembangan Ilmu Pengetahuan yang penulis peroleh di bangku perkuliahan, sehingga bisa bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan.

- b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi LPMK Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan.
- c. Hasil penelitian ini semoga berguna dan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya jurusan Ilmu Pemerintahan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemersalahan ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Teori Pemerintahan

Secara etimologis pemerintahan dapat di artikan sebagai berikut perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang di perintah memiliki kepatutan akan keharusan. setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah di tambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut (Syafiie, 2007:4)

Pemerintah atau pemerintahan dalam arti sempit adalah pemegang kekuasaan eksekutif, sedangkan arti luas lembaga dan kegiatannya dalam suatu negara. Jadi juga menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif (Sudibjo dalam Ismani H, 1996:8). Menurut Sitanggang (1996:23) pemerintah adalah suatu sistem dari gerak semua fungsi yang ada di suatu masyarakat negara yang mempunyai wilayah tertentu yang digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mencapai tujuan meliputi bidang-bidang kejasmanian dan kerohanian. Bahkan menurut Kuper (2000:218) istilah *goverment* (pemerintah) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik.

Sedangkan menurut Ndraha (2005:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia

dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Musanef (1992:8) mengartikan ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinamis, berhubungan dengan keserasian ke dalam hubungan antara dinamis itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya.

Menurut Sedarmayanti (2004:35) pemerintah atau *government* adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau *government* adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya secara etimologis pemerintahan dapat di artikan sebagai berikut di bawah ini :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki kepatuan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi awalan “an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

(Syafiie, 2007:4)

Pemerintahan (*Governance*) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat (dalam Awang dan Wijaya, 2012:8).

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. (Sedermayanti 2004 :9)

Menurut Budiarto (2003:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara. Rakyat atau penduduk suatu Negara memiliki tujuan untuk membentuk Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Pemerintah adalah lembaga atau suatu lembaga organisasi orang-orang yang perintah-perintahnya ditaati oleh rakyat. Sedangkan pemerintahan adalah bergerakaknya semua fungsi-fungsi kedaulatan atau kekuasaan negara dalam mencapai tujuan bersama, dalam kenyataan sehari-hari dapat menunjukkan keutuhan kegiatan pemerintahan seperti pemerintahan Kabupaten, Kelurahan dan lain-lain dalam pengertian umum. (Sitanggang 1998:118)

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian, dan minuman. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain, dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dari institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

2. Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Lurah sebagai pemimpin formal yang langsung berhadapan dengan masyarakat, melaksanakan teknis administrasi pemerintahan dan tugas pembangunan di Kelurahan. Maka dari itu tugas seorang lurah dalam memimpin kelurahan sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan di masyarakat sehingga dengan demikian diharapkan agar masyarakat di lingkungan kelurahan bisa pelayanan yang baik.

Pada dasarnya lurah berkewajiban untuk berusaha terus menerus menciptakan situasi aman dan tertib bagi seluruh anggota masyarakat baik di banding mental spritual maupun fisik meterial. (Wijaya 2002;116).

3. Teori Kebijakan

Menurut Dunn perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

- a. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- b. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- d. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan. (Dunn, 2003;105)

Menurut Laswell, Kebijakan adalah sebagai sasaran untuk mencapai tujuan kebijakan itu tertuang dalam program yang di arahkan pada pencapaian tujuan nilai dan praktek. (dalam Lubis, 2007:19)

Syafiie (2010:150) menyebutkan : “Model kebijakan yang sesuai dengan sekarang ini adalah model sistem di mana memperhatikan desakan-desakan

lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, atau keperluan dan hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan, dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Menurut Anderson menyatakan bahwa “*Public Policies are those policies developed by govermental bodies and officials*”. Sedangkan menurut (Kansil dan Cristine, 2008:190) kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

4. Teori Peranan

Peranan dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya disfungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasional, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesional. Menurut Ndraha (2003:53) peranan diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Menurut Siagian (2001:148) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai stabilisator,
2. Sebagai inovator,

3. Sebagai pelopor.

Menurut pendapat Soekanto (2004:244) Peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sementara menurut Ndraha (1987:253) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang di harapkan dari atau lebih telah di tetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan. Menurut Soekanto (2004: 243) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Berdasarkan pendapat tersebut, peranan mencakup tiga aspek. *Pertama*, peranan merupakan penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat. Perilaku seseorang yang berkaitan dengan posisi dan kedudukannya di masyarakat. Perilaku tersebut diatur dengan peraturan yang berlaku untuk membimbing seseorang di masyarakat. *Kedua*, peranan merupakan konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya. *Ketiga*, peranan merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peranan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan-peranan tersebut. (Friedman, M, 1998 : 286)

Konsep tentang peran (*role*) menurut Komarudin (1994:768) adalah sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menentukan perilaku seseorang. Pola perilaku yang dilakukan dalam kelompok merupakan karakteristik dari individu. Perilaku dari setiap individu merupakan hubungan sebab akibat dalam pranata sosial. Peranan menurut pendapat Soekanto tersebut mencakup tiga hal, yaitu tentang hak dan kewajiban, perilaku, serta tanggapan. Ketiga hal tersebut sangat menentukan bagaimana seseorang menjalankan peranannya. Hak dan kewajiban merupakan

acuan seseorang dalam menjalankan peranan. Perilaku merupakan tindakan-tindakan seseorang berdasarkan norma dan etika dalam menjalankan peranan. Tanggapan merupakan penilaian dari pihak lain terhadap orang yang telah melaksanakan peranan.

Menurut Kusnandi (2005:358) ada 3 peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi yaitu :

1. Peran pribadi (*interpersonal role*) mengacu pada hubungan antar pemimpin dengan yang lain baik dalam organisasi maupun di luar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peran yang berbeda yaitu :
 - a. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi.
 - b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
 - c. Peran perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
2. Peran berkaitan dengan informasi (*informasi role*) di mana pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerja sama antar pegawai yang berada dalam lingkungannya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam 3 hal yaitu :
 - a. Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan di luar organisasi yang di anggap relevan.
 - b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruhan bagian organisasi.
 - c. Sebagai juru bicara.

3. Peran keputusan (*decision role*) dalam hal ini pemimpin memainkan empat peran yaitu peran wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Menurut Soekanto (2014:170) lembaga kemasyarakatan adalah merupakan himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Soekanto (2014: 198) juga mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakannya asosiasi. Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan menurut Koentjaningrat (2009:61) untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sebuah lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu.

Menurut Emil Salim (1984:56) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada hakikatnya memiliki 2 (dua) makna pokok yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat desa melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemapanan yang diharapkan.
- b. Memberikan wewenang secara profesional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan diri.

Kemandirian masyarakat tidak berarti pemerintah akan membiarkan masyarakat berkembang tanpa ketetapan arah, tetapi pemerintah senantiasa responsif dalam mencermati permasalahan yang dihadapi masyarakat serta memberikan bantuan dan fasilitas agar masyarakat secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

7. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah yang paling banyak berperan terutama dalam proses perencanaan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih, 2014:92)

Widjojo Nitisastro (2014:92) memperincikan apa yang tercakup dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.
2. Pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan.

Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumberdaya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Sebuah perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya dapat dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral dan spasial. Dari segi tingkatan pemerintahan, perencanaan pembangunan dapat berupa perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dilihat dari dimensi waktu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat dari segi proses dan mekanismenya dapat bersifat *top down* atau *bottom up planning*, dan dapat merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut.

Perencanaan pembangunan adalah melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan (Listyaningsih,2014:93).

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang dipilih dan dilakukan secara sadar untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan guna untuk meningkatkan kesejahteraan suatu pembangunan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dan referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

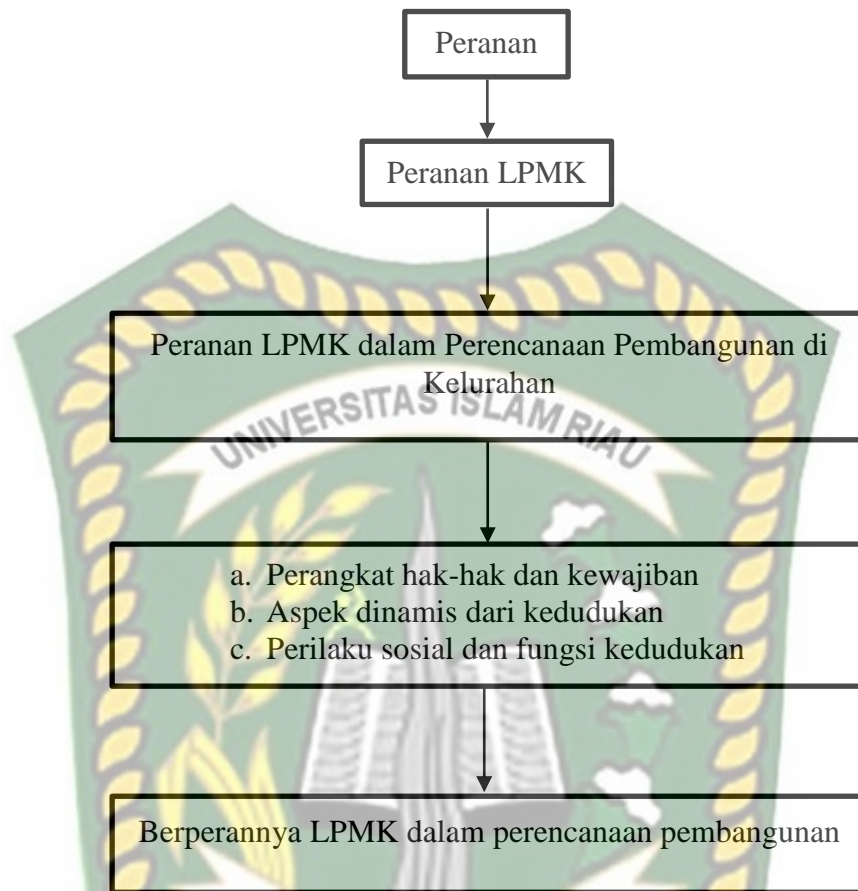
No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Septiani Putri Winata (2018) JOM FISIP Vol. 5 No. 1 April 2018	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Metode penelitian	Permasalahan penelitian yang berbeda dan lokasi penelitian
2	Ryan Anggria Pratama (2017) Jurnal Trias Politika Vol. 1 No 2 Oktober 2017	Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Membantu Tugas Lurah	Tugas dan fungsi LPMK dan metode penelitian	Permasalahan penelitian Lokasi penelitian Indikator yang ditetapkan
3	M.Wahyu Arbain (2014) eJournal Ilmu	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Tugas dan fungsi LPMK dan metode	Permasalahan penelitian Lokasi

	Pemerintahan, 2014,2 (4) : 3259 - 3272	Kelurahan (LPMK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara	penelitian	penelitian Indikator yang ditetapkan
--	--	---	------------	---

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dan referensi dalam penelitian ini, maka terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, jelaslah bahwa penelitian ini termasuk dalam penelitian lanjutan dari peneliti terdahulu.

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikir ini adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Studi pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan). Kerangka pemikiran ini bermaksud mencari kesimpulan dengan memaparkan keterkaitan antara indikator-indikator penentu, seperti pada gambar berikut ini :



Gambar II.1 : Kerangka Pikir Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Studi pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)

D. Konsep Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional atau (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Supaya penulis mudah dalam menganalisa dalam penelitian ini, berikut akan disusun dalam bentuk konsep operasional yang sebagai berikut :

1. Peranan adalah suatu usaha atau kemampuan dari orang-orang yang menduduki jabatan untuk dapat menggerakkan serta menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat dalam mencapai suatu tujuan.
2. Kelurahan dalam penelitian ini adalah Kelurahan Pangkalan Lesung yang merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Pangkalan Lesung.
4. Perencanaan Pembangunan adalah seluruh rencana pembangunan yang ada di Kelurahan Pangkalan Lesung yang keseluruhannya merupakan usulan dari pemerintah kelurahan.
5. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Studi pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan) dalam penelitian ini dapat dilihat dari indikator yang ditetapkan berikut ini:
 - a. Perangkat hak-hak dan kewajiban
 - b. Aspek dinamis dari kedudukan
 - c. Perilaku sosial dan fungsi kedudukan

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Studi pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian
1	2	3	4
Peran adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila orang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. (Soekanto 2004:243)	Peran LPMK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Perangkat hak-hak dan kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana pembangunan - Membuat skala prioritas program pembangunan - Mengusulkan program pembangunan
		Aspek dinamis dari kedudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Menggali aspirasi masyarakat - Mencermati pembangunan paling yang dibutuhkan masyarakat - Memahami kebutuhan paling mendasari yang harus dipenuhi
		Perilaku sosial dan fungsi kedudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalin komunikasi dengan perangkat masyarakat - Diskusi bersama masyarakat - Mengkaji kelemahan dan kelebihan program pembangunan - Mencari solusi bersama

Sumber : Data Olahan 2020

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan metode kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada penelitian ini.

Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan, informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Sebagaimana dinyatakan Garna (1999:32) pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak selalu memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala yang didapatkan.

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena:

- a. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana peran LPMK dalam perencanaan pembangunan dan hambatannya. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.

- b. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sebagai lokasi penelitian. Alasan pemilihan lokasi ini disebabkan rendahnya peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Lesung dalam memberikan sumbangan pemikiran pada perencanaan pembangunan.

C. Informan atau Subjek/Objek Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah informan utama dan informan tambahan.

- a. Informan utama terdiri dari Ketua LPMK Kelurahan Pangkalan Lesung.
- b. Informan tambahan yakni
 - Lurah Pangkalan Lesung
 - Anggota LPMK Pangkalan Lesung
 - Ketua RW/RT Pangkalan Lesung
 - Tim Pelaksana Pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung.

D. Teknik Perancangan dan Penetapan Informan

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2012: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Studi pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan).

Dengan demikian, informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yakni Informan utama adalah Ketua LPMK Kelurahan Pangkalan Lesung, Lurah Pangkalan Lesung, dan Informan tambahan yakni masyarakat Kelurahan Pangkalan Lesung dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, sehingga dengan menetapkan informan di atas mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah Ketua LPMK, Lurah, dan masyarakat Kelurahan Pangkalan Lesung. Adapun data primer tersebut adalah: identitas responden, indikator yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Badan Pusat Statistik tentang Keadaan geografis lokasi penelitian.
2. Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Kelurahan
3. Keadaan Kelurahan Pangkalan Lesung
4. Bentuk Pembangunan yang telah dilaksanakan
5. Jumlah Usulan Pembangunan
6. Kebijakan Pembangunan

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2014:206) pengumpulan data adalah sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan risert yang muncul.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan informan yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara dilaksanakan dengan teknik terstruktur, dimana peneliti menyediakan pedoman pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada informan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) untuk berupa mencari data sebanyak mungkin dari para informan, terutama informan utama. Peneliti memberikan pertanyaan sedetil

mungkin untuk mengetahui Peran dan Hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Studi pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)

- b. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Di mana observasi dilaksanakan untuk melihat aktivitas perencanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan.
- c. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Instrumen Penelitian

Untuk memandu/memudahkan peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data maka beberapa cara peneliti lakukan: *pertama*, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai; *kedua*, mengidentifikasi subyek/informan yang hendak diwawancarai; *ketiga*, mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menulis atau merekam hasil wawancara; *keempat*, mencari alamat/nomor kontak dan menghubungi informan untuk dimintai kesediaan waktu diwawancarai; *kelima*, mewawancarai informan; *keenam*, meminta kesediaan informan untuk memberikan data/dokumen sesuai bidangnya.

H. Uji Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2012:117). Jadi data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Adapun langkah yang digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan teknik pengumpulan data yang dipakai.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sejenisnya. Dengan demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

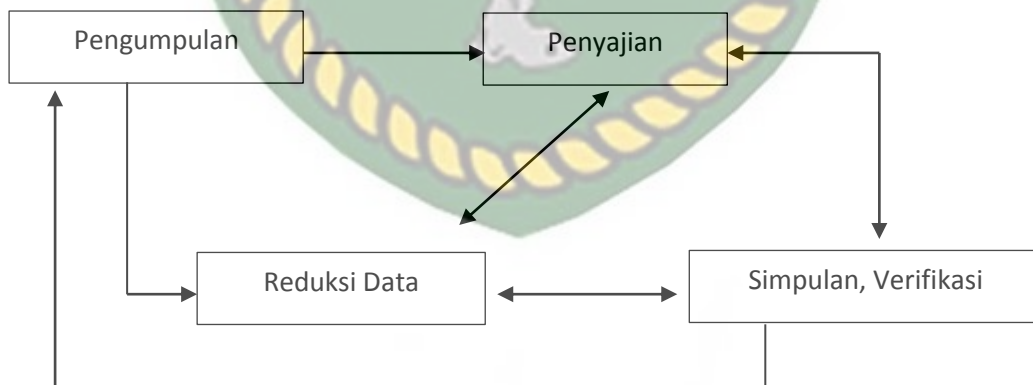
Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif.

Proses analisa data dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar III.1 : Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



(Miles dan Huberman, 2014:20)

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan.

Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan, kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponen tersebut menurut Miles dan Huberman (2014:16-19), yaitu:

Pertama, Tahap pengumpulan data: peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

Kedua, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal yang tersusah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Ketiga, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaannya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin

Keempat, Menarik kesimpulan/verifikasi adalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama dan menguras tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

J. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus tahun 2020. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Studi pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2020/2021																			
		Oktober				November				Desember				Maret				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x	x													
2	Seminar UP								x												
3	Revisi UP									x	x										
4	Revisi Kuisisioner											x	x	x							
5	Rekomendasi Survey													x	x						
6	Survey Lapangan													x	x	x					
7	Analisis data													x							
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)															x	x				
9	Konsultasi Revisi Skripsi															x					
10	Ujian Konferehensif Skripsi																x	x			
11	Revisi Skripsi																	x	x		
12	Penggandaan Skripsi																		x	x	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Kelurahan Pangkalan Lesung

1. Sejarah Kelurahan

Kelurahan Pangkalan Lesung sebelumnya merupakan sebuah desa yang ada di Kabupaten Pelalawan dan sebelumnya juga termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar, sebelum Desa Pangkalan Lesung berstatus Desa, Pangkalan Lesung merupakan suatu wilayah perbatinan yang ada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Pelalawan yang disebut dengan wilayah perbatinan *Tuo Napuh*.

Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia di Proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 maka tanggal 28 Oktober 1945, Raja Pelalawan terakhir menyatakan Kerajaan Pelalawan meleburkan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Perbatinan Tuo Napuh secara otomatis juga masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Kelurahan Pangkalan Lesung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor: 08 tahun 2004 tentang pemekaran dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan di ibu Kota kecamatan.

Pada tanggal 22 November 2005 Desa Pangkalan Lesung di resmikan oleh Bupati Pelalawan menjadi Kelurahan Pangkalan Lesung dengan luas wilayah 18.020 Ha, yang saat ini dengan jumlah penduduk 9.056 jiwa yang terdiri dari 3 (Tiga) lingkungan, 13 (tiga belas) Rukun Warga dan 34 (tiga puluh empat) Rukun Tetangga, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Desa Pesaguan dan Desa Dusun Tua

- Selatan berbatas dengan Kelurahan Ukui dan Desa Air Mas
- Timur berbatas dengan Desa Mulya Subur dan Desa Sari Makmur
- Barat berbatas dengan Desa Air Hitam.

2. Kondisi Wilayah

Kelurahan Pangkalan Lesung dengan luas 180,2 km² dan jika dipresentasikan ± 95 % merupakan wilayah dataran dengan mencakup 3 (Tiga) lingkungan, 13 (tiga belas) Rukun Warga dan 34 (tiga puluh empat) Rukun Tetangga yang terbagi atas beberapa karakteristik yaitu : adanya daerah aliran sungai dan daerah terpencil di beberapa Rukun Warga sehingga bila musim hujan dijumpai adanya kondisi jalan yang sulit untuk di tempuh.

Di sisi lain Kelurahan Pangkalan Lesung juga pada musim kemarau sangat sulit untuk mendapat air bersih, kondisi ini memang bertolak belakang dengan kondisi wilayah yang berada di daerah dataran, semua ini akibat dari Pembukaan Lahan perkebunan yang dilakukan oleh PT. Musim Mas dan masyarakat sehingga rawa-rawa yang selama ini berfungsi menampung dan menahan air kini sudah menjadi darat.

Pada kondisi ini Kelurahan Pangkalan Lesung sebagai Ibu Kota Kecamatan Pangkalan Lesung berada di tepi jalan Lintas Timur (Jalan Negara) Yang panjangnya + 14 Km mulai dari batas Kecamatan Ukui sampai batas Desa Pesaguan.

3. Keadaan Alam

Kelurahan Pangkalan Lesung terletak di jalur Katulistiwa dengan iklim panas memiliki kondisi Geografis pada ketinggian 10–15 Meter dari permukaan

laut dengan struktur tanah dataran rendah (Rawa) serta sebagian dataran dengan Kondisi kering berbukit dengan kondisi curah hujan 5,582,5 Mm / Tahun.

Keadaan alam yang demikian maka Kelurahan Pangkalan Lesung di domisili oleh tumbuhan jenis tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dengan karet, keadaan seperti ini terjadi akibat adanya Perusahaan Perkebunan yang beroperasi dalam wilayah Kelurahan Pangkalan Lesung yaitu PT. Musim Mas dan PT. Sari Lembah Subur di sekitar Kelurahan Pangkalan Lesung.

Masyarakat petani yang dulunya mengutamakan bercocok tanam jenis tanaman pangan kini sebagian besar sudah berubah ke jenis tanaman perkebunan.

4. Sosial Budaya

Penduduk Kelurahan Pangkalan Lesung yang heterogen berasal dari seluruh wilayah yang ada di Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda telah melahirkan Banyak Organisasi dan seni budaya namun demikian masyarakat Kelurahan Pangkalan Lesung dapat hidup berdampingan dengan Harmonis antara satu sama lainnya. Ini disebabkan antara masing-masing suku dan agama dapat saling menghargai dan menghormati.

5. Jarak Geografis

Mengenai jarak ke tempat-tempat umum dan pusat pemerintahan dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.1 Jarak Kelurahan dengan Pusat Pemerintahan dan Tempat Umum

No	Tempat	Jarak (Km)
1	Ke Pemerintahan Kecamatan	0.5 KM
2	Ke Pemerintahan Kabupaten/Kota	60 KM
3	Ke Pemerintahan Propinsi	130 KM
4	Ke Kantor Kapolres Pelalawan	50 KM
5	Ke Tempat Wisata Air Panas	10 KM
6	Ke Pasar Pangkalan Lesung	0 KM

Sumber: Kantor Lurah Pangkalan Lesung

6. Keadaan Demografi

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kelurahan Pangkalan Lesung Berdasarkan jender dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.2 Kependudukan Data Penduduk Kelurahan Pangkalan Lesung Tahun 2020

No	Jenis Data			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepala Keluarga
1	5.462	5.321	10.782	2.715

Sumber: Kantor Lurah Pangkalan Lesung

Jumlah penduduk Kelurahan Pangkalan Lesung pada tahun 2019 dan tahun 2020 Berdasarkan Usia dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.3 Keadaan Penduduk Menurut Usia

No	Umur	Tahun	
		2019	2020
1	0 – 12 Bulan	260 Orang	460
2	> 1 - < 5 Tahun	1.361 Orang	1.430
3	> = 5 - < 7 Tahun	346 Orang	520
4	> = 7 - < 15 Tahun	1.424 Orang	1.620
5	> 15 – 56 Tahun	5.375 Orang	6.503
6	> 56 Tahun	290 Orang	250
Jumlah		9.056 Orang	10.782

Sumber : Kantor Lurah Pangkalan Lesung

b. Data Kependudukan Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk Kelurahan Pangkalan Lesung pada tahun 2019, dan tahun 2020 Berdasarkan Agama dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.4 Jumlah Pendudukan Berdasarkan Agama

No	Agama	Tahun	
		2019	2020
1	Islam	4.316 Orang	5.138 Orang
2	Kristen	4.324 Orang	5.148 Orang
3	Katolik	399 Orang	474 Orang
4	Budha	13 Orang	16 Orang
5	Hindu	0 Orang	0 Orang
6	Konghucu	4Orang	6 Orang
Jumlah		9.056 Orang	10.782 Orang

Sumber: Kantor Lurah Pangkalan Lesung

c. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Data Penduduk Kelurahan Pangkalan Lesung berdasarkan pekerjaan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5 Jenis Pekerjaan Penduduk Pangkalan Lesung

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum bekerja	2.727
2	Aparatur Negara	60
3	Tenaga Pengajar	50
4	Wiraswasta	1.492
5	Pertanian/Peternak	755
6	Nelayan	2
7	Agama	3
8	Pelajar/ Mahasiswa	1.463
9	Tenaga Kesehatan	8
10	Pensiun	5
11	Pekerjaan Lainnya	4.800

Sumber: Data dari Kantor Kelurahan

B. Pemerintahan Kelurahan Pangkalan Lesung

1. Keadaan Aparatur Pemerintahan Kelurahan

Kelurahan Pangkalan Lesung saat ini di Pimpin oleh seorang Lurah dan di bantu oleh seorang Sekretaris Lurah dan 12 (dua belas) orang Tenaga Fungsional Umum yang terdiri dari 11 (Sebelas) orang Pegawai Tidak Tetap, dan 1 (satu) Orang tenaga suka rela. Dapat dilihat pada tabel berikut :

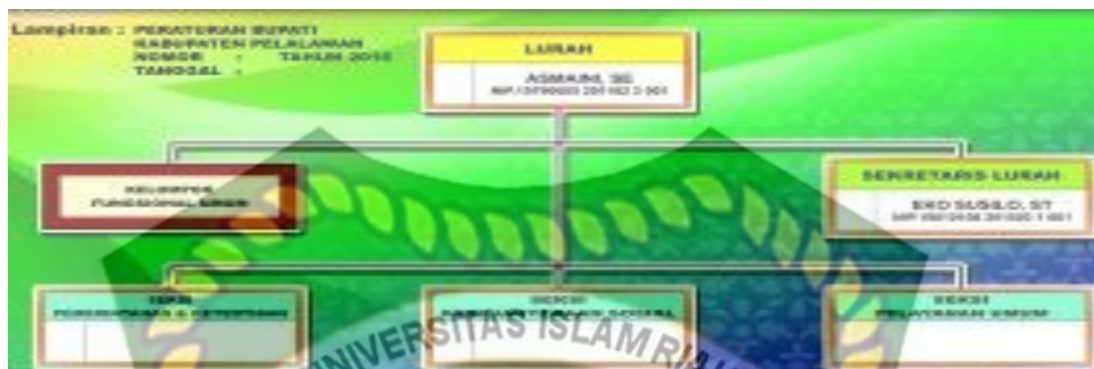
Tabel IV.6 Keadaan Pegawai Kelurahan Pangkalan Lesung

No	Nama/TTL	NIP	Jabatan	Pendidikan	Ket
1	Asmaini, SE Pkl. Lesung, 06-05-1979	19790605 201102 2 001	Lurah	S-I	PNS
2	Eko Susilo, ST Magelang, 08-01-1981	19810108 201503 1 001	Seklur	S-I	PNS
3	Raisdar Pkl. Lesung, 25-10-1971	NIK.53 06 1362	Fungsional Umum	SMA	PTT
4	Darniis Pkl. Lesung, 05-09-1983	NIK.53 06 1351	Fungsional Umum	SMA	PTT
5	Elvi Yanti, S.Pd.I Pkl Lesung, 03-02-1990	-	Fungsional Umum	S-I	PTT
6	Armalis, SH Pkl Lesung, 06-08-1981	-	Fungsional Umum	S-I	PTT
7	Pri Anugrah, S.I.Kom Pkl Lesung, 18-04-1993	-	Fungsional Umum	S-1	PTT
8	Asi Yulizar Pkl Lesung, 06-04-1994	-	Fungsional Umum	Madrasyah Aliyah	PTT
9	Suherly Pkl Lesung, 07-07-1982	-	Fungsional Umum	SD	PTT
10	Sukriandis, SE Pkl Lesung, 16-10-1990	-	Fungsional Umum	S-I	PTT
11	Abd Gapur, SH Equator, 07-08-1989	-	Fungsional Umum	S-I	PTT
12	Nurhalimah, S.Pd Bagan Sinembah, 18-10-1990	-	Fungsional Umum	S-I	PTT
13	Rusman Pkl Lesung, 14-06-1973	-	TKS	SMA	TKS
14	Nova Elpera, SKM Pkl Lesung, 19-09-1994	-	Fungsional Umum	S 1	PTT

Sumber Kantor Lurah Pangkalan Lesung

Perangkat Kelurahan di atas 50% bukan PNS, di bagan di atas dapat dilihat struktur yang terisi Cuma Lurah dan Sekretaris Lurah, sedangkan Kasi pelayanan Umum, Kasi Pemerintahan dan Tramtib dan Kasi Kesejahteraan Sosial masih Kosong, pekerjaan Lurah dibantu Oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pangkalan Lesung



2. Pembagian Rukun Tetangga dan Rukun Warga berdasarkan Lingkungan

Pembagian wilayah lingkungan berdasarkan Rukun Warga dan Rukun Tetangga dapat di lihat berdasarkan tabel di bawah ini ;

Tabel IV.7 Pembagian RW dan RT Dalam Lingkungan Kelurahan

No	Nama Lingkungan	Jumlah Rukun Warga	Jumlah Rukun Tetangga
1	Lingkungan Satu	05	14
2	Lingkungan Dua	02	06
3	Lingkungan Tiga	06	14
Jumlah		13	34

Sumber Kantor Lurah Pangkalan Lesung

3. Visi & Misi Pelayanan

VISI

Terwujudnya manajemen pemerintahan yang berkualitas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik

Misi

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia kantor lurah pangkalan lesung

2. Mewujudkan sarana dan prasarana yg baik dan memadai
3. Mewujudkan metode kerja yang cepat dan tepat

C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Lesung mempunyai Tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, bersama-sama merencanakan program pembangunan baik jangka panjang maupun jangka pendek yang ada di wilayah Kelurahan Pangkalan Lesung, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, susunan pengurusnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.8 Keadaan LPM Kelurahan Pangkalan Lesung

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Armalis,SH	Ketua	Periode 2018/2021
2	Mahyudin	Sekretaris	
3	Raisdar	Bendahara	
4	Risvan	Seksi Pembangunan	
5	Rizky Zulhernadi	Seksi Kebersihan Lingkungan Hidup	
6	Marhadi,MR	Seksi Agama dan Sosial	
7	Dede Iskandar	Seksi Usaha Kecil Menengah	
8	Sian	Seksi Pemuda dan Olahraga	
9	Yunita Indriani, S.Pd	Seksi Pemberdayaan Perempuan	

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum membahas hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan identitas informan yang menjadi sumber informasi pada penelitian ini. Di mana identitas ini perlu untuk disampaikan sebagai bentuk keabsahan dari data yang diperoleh pada penelitian ini. Adapun data identitas informan sebagai berikut:

Tabel V.1 Karakteristik Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1.	Armalis	43	Laki-laki	S-1	Ketua LPM
2.	Eko Susilo	40	Laki-laki	S-1	Lurah
3.	Mahyudin	38	Laki-laki	S-1	Sekretaris LPM
4.	Raisdar	52	Perempuan	SMA	Bendahara LPM
5.	Jakfar	48	Laki-laki	SMA	Ketua RW 003
6.	Ahmad Jaiz	43	Laki-laki	SD	Ketua RT 02/02
7.	Rizki Zulhernadi	31	Laki-laki	SMA	Wiraswasta
8.	Dede Iskandar	26	Laki-laki	S-1	Tenaga Penyuluh

Sumber: Olahan Penelitian, 2021.

Data informan yang dipaparkan di atas memberikan gambaran bahwa berada rentang usia 26 – 52 tahun, sehingga seluruh informan merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam memberikan informasi

sesuai permasalahan. Sementara dari jenis kelamin para informan penelitian ditemukan 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, sehingga dapat dikatakan penelitian ini telah terwakili dari segi jenis kelamin. Sedangkan dari latar belakang pendidikan yang dimiliki mulai dari tingkat pendidikan terendah SD sampai ke tingkat pendidikan tinggi S-1. Seluruh informan memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga memahami dengan sangat jelas permasalahan yang ada di LPMK dalam turut serta merencanakan pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

B. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Peran menjadi penting untuk dilihat, mengingat peran bisa diwujudkan dari berbagai sesuai dengan tatanan sosial yang mengiringinya. Pada penelitian peran yang hendak dilihat adalah sebuah lembaga yang berisikan komponen-komponen masyarakat di Kelurahan dalam turut serta membantu pemerintah Kelurahan untuk merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan sebuah lembaga yang bermitra dengan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan berbagai hal yang berkenaan dengan masyarakat seperti menyerap aspirasi masyarakat, ikut merencanakan pembangunan, menggalang swadaya dari

masyarakat, dan lain sebagainya. Peran dari lembaga ini sangat penting untuk dilihat mengingat saat ini pemerintah Kelurahan telah memiliki anggaran untuk digunakan dalam pembangunan, sehingga pembangunan yang dijalani menjadi tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat.

Pada penelitian ini perencanaan pembangunan yang hendak dilihat adalah perencanaan yang bersifat pembangunan fisik, sehingga jelas pokok permasalahannya. Di mana keikutserta LPMPK dalam membantu merencanakan pembangunan sebagai langkah dari penyerapan aspirasi masyarakat yang membutuhkan pembangunan.

Dengan demikian dalam penelitian ini ditetapkan beberapa indikator untuk melihat peran dari LMPK dalam perencanaan pembangunan. Indikator ini disusun berlandaskan dari konsep teori yang dirumuskan oleh Soekanto mengenai peran. Adapun pembahasan hasil penelitian dapat diuraikan satu persatu sesuai indikator penelitian berikut:

1. Perangkat Hak-Hak dan Kewajiban

a. Menyusun rencana pembangunan

Menyusun rencana pembangunan merupakan langkah awal yang ditempuh untuk mendapatkan pembangunan yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada dilingkungannya. Untuk itu dapat diketahui dari tanggapan masing-masing informan berikut:

Hasil tanggapan dari Armalis selaku ketua LPM Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi bahwa:

LPMK merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang merupakan mitra kelurahan dalam menyusun rencana pembangunan di kelurahan, melalui Musrenbang tingkat kelurahan dan menyampaikan aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Begitu juga dengan hasil tanggapan dari Eko Susilo selaku Lurah Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Yaitu ikut dalam proses pembangunan dalam kegiatan musrenbang (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Sementara dari tanggapan dari Mahyudin selaku sekretaris LPM Kelurahan Pangkalan Lesung menyatakan:

Keikutsertaan LPMK Kelurahan Pangkalan Lesung yaitu ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan dalam kegiatan musrenbang (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Raisdar selaku bendahara LPM Kelurahan Pangkalan Lesung sebagai berikut:

LPMK ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Jakfar selaku ketua RW di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut:

Ikut dalam proses pembangunan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Armalis Ahmad Jaiz selaku RT di Kelurahan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Ikutserta dalam proses pembangunan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Rizki Zulhernadi selaku pelaksana pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut ini:

Ikutserta dalam proses perencanaan pembangunan pada kegiatan musrenbang (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Dede Iskandar selaku tenaga penyuluh di Kelurahan Pangkalan Lesung memberi informasi bahwa:

Ikut serta dalam semua tahapan proses pembangunan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil pengamatan lapangan yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa setiap tahunnya anggota LPMK melakukan perumusan rencana pembangunan yang kemudian dibahas bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan lurah. Dengan adanya langkah merumuskan perencanaan pembangunan ini mengindikasikan adanya keterlibatan dari LPMK dalam proses pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung.

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan informan di atas terlihat bahwa anggota LPMK Kelurahan Pangkalan Lesung telah berperan dalam menyusun rencana pembangunan setiap tahunnya bersama dengan lurah. Dengan demikian jelaslah bahwa LPMK telah berperan ikut serta menyusun rencana pembangunan yang ada di Kelurahan Pangkalan Lesung.

b. Membuat skala prioritas program pembangunan

Membuat skala prioritas program pembangunan merupakan langkah yang diambil oleh LMPK sebagai bentuk sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan. Di mana skala prioritas program pembangunan penting untuk ditetapkan sebagai salah satu upaya mensinkronkan program dengan program pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, sehingga pembangunan di Kelurahan dapat dilaksanakan.

Hasil tanggapan dari Armalis selaku ketua LPM Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi bahwa:

Melalui musyawarah di tingkat RT, RW, Kepala Lingkungan dan masyarakat. LPMK dan lurah berperan dalam mengusulkan skala prioritas atas dasar kebutuhan masyarakat yang mendesak melalui musrenbang di tingkat kecamatan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Begitu juga dengan hasil tanggapan dari Eko Susilo selaku Lurah Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Membuat skala prioritas pembangunan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Sementara dari tanggapan dari Mahyudin selaku sekretaris LPM Kelurahan Pangkalan Lesung menyatakan:

Dalam pelaksanaan musrenbang LPMK Pangkalan Lesung membuat skala prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di masyarakat dengan melihat dan sesuai anggaran (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Raisdar selaku bendahara LPM Kelurahan Pangkalan Lesung sebagai berikut:

Membuat skala prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat dengan melihat anggaran yang tersedia (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Jakfar selaku ketua RW di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut:

Membuat prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Armalis Ahmad Jaiz selaku RT di Kelurahan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Membuat skala prioritas pembangunan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Rizki Zulhernadi selaku pelaksana pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut ini:

Bentuk kegiatan musrenbang LPMK Pangkalan Lesung dengan membuat skala prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Dede Iskandar selaku tenaga penyuluh di Kelurahan Pangkalan Lesung memberi informasi bahwa:

Menetapkan skala prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil pengamatan lapangan yang telah dilaksanakan terlihat bahwa LPMK Kelurahan Pangkalan Lesung telah menetapkan beberapa skala prioritas pembangunan yakni pembangunan jalan, pembangunan drainase, pembangunan gedung (sekolah, perpustakaan, dan lainnya), pembukaan jalan baru. Kemudian skala prioritas lainnya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian dari tanggapan informan, wawancara di atas memberikan penjelasan bahwa LPMK Kelurahan Pangkalan Lesung telah berperan dalam membuat skala prioritas program pembangunan, sehingga kedepannya pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat dan berkesinambungan.

c. Mengusulkan program pembangunan

Mengusulkan program pembangunan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi LMPK sebagai mitra lurah dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di Kelurahan. Di mana LPMK setiap periode telah menetapkan skala prioritas pembangunan yang menjadi landasan untuk usulan pembangunan di tingkat kelurahan.

Hasil tanggapan dari Armalis selaku ketua LPM Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi bahwa:

Pembangunan yang diusulkan oleh LPMK Kelurahan Pangkalan Lesung tahun 2021 yakni pembangunan gedung satu atap yang dimanfaatkan oleh PKK, UEK SP, dan LPMK dan gedung perpustakaan. Kelurahan Pangkalan Lesung memiliki anggaran dana pembangunan melalui program

pembangunan infrastruktur kelurahan melalui APBD sebesar Rp. 400.000.000,- dan dana DAU Pusat sebesar Rp. 350.000.000,- (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Begitu juga dengan hasil tanggapan dari Eko Susilo selaku Lurah Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Berupa jalan dan pembangunan-pembangunan lainnya. Anggaran yang tersedia sesuai kebutuhan pembangunan yang akan dilaksanakan. Yaitu dari 1. Swadaya masyarakat, 2. Program pemerintah daerah, 3. Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Sementara dari tanggapan dari Mahyudin selaku sekretaris LPM Kelurahan Pangkalan Lesung menyatakan:

Bentuk usulan program pembangunan yang diadakan LPMK berupa pembuatan jalan, pembangunan sekolah. Anggaran yang tersedia berasal dari anggaran swadaya/ pendapatan dari penghasilan LPMK Kelurahan Pangkalan Lesung dari aset yang menghasilkan sekitar 50 sampai 150 juta pertahun. Sumber anggaran untuk pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung yaitu 1. Swadaya masyarakat, 2. Program pemerintah daerah, 3. DAU Pusat, dan 4. Dana hasil usaha LPMK. (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Raisdar selaku bendahara LPM Kelurahan Pangkalan Lesung sebagai berikut:

Yaitu berupa pembangunan sekolah, pembuatan jalan. Anggaran yang tersedia berasal dari anggaran swadaya/ pendapatan dari penghasilan LPM Kelurahan Pangkalan Lesung dari aset yang menghasilkan 50 sampai 150 juta pertahun. Yaitu dari program pemerintah daerah, DAU dari pemerintah pusat, dan swadaya masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Jakfar selaku ketua RW di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut:

Membuat prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pembuatan pos ronda. Anggaran swadaya berasal dari aset kelurahan menghasilkan 50 sampai 150 juta pertahun. Dana swadaya masyarakat, dana alokasi umum, dan program pemerintah daerah (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Armalis Ahmad Jaiz selaku RT di Kelurahan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Pembuatan jalan dan pembangunan jalan. Anggaran sesuai dengan bangunan yang dibangun. Swadaya masyarakat dan dana dari pemerintah (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Rizki Zulhernadi selaku pelaksana pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut ini:

Pembuatan jalan, pembangunan sekolah. Adapun anggaran yang tersedia berasal dari anggaran swadaya, pendapatan dari penghasilan LPMK, dan aset menghasilkan dana 50 sampai 150 juta pertahun. Yaitu berasal dari

swadaya masyarakat, program pemerintah daerah, dan dana dari pemerintah pusat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Dede Iskandar selaku tenaga penyuluh di Kelurahan Pangkalan Lesung memberi informasi bahwa:

Pembangunan sekolah dan pembuatan jalan. Yaitu anggaran swadaya dan pendapatan dari penghasilan usaha LPMK. Swadaya masyarakat, dana dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Pengamatan yang telah penelitian lakukan terlihat bahwa LPMK Kelurahan Pangkalan Lesung telah menetapkan dan menyampaikan usulan-usulan program pembangunan kepada Lurah untuk ditindak lanjuti dan ditetapkan. Kemudian ada usulan yang harus diperjuangkan sampai ke tingkat Kabupaten, sehingga diperlukan dukungan dari Lurah dan Camat untuk memperjuangkan usulan dari LPMK dalam turut serta berpartisipasi mengusulkan program pembangunan di kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa LPMK telah mengusulkan berbagai program pembangunan di tingkat Kelurahan, sehingga ada beberapa program yang terealisasi dan ada beberapa program pembangunan yang tidak terealisasi atau ditunda mengingat keadaan keuangan atau dana yang dialokasikan di Kelurahan Pangkalan Lesung.

Dengan demikian pada indikator perangkat hak-hak dan kewajiban ini telah dilaksanakan oleh LMPK dalam memerankan fungsinya sebagai lembaga mitra dari lurah. Di mana LMPK Kelurahan Pangkalan Lesung telah berperan

dalam menyusun rencana pembangunan, telah menetapkan skala prioritas program pembangunan, dan mengusulkan program pembangunan.

2. Aspek Dinamis dari Kedudukan

a. Menggali aspirasi masyarakat

Menggali aspirasi masyarakat merupakan langkah yang harus ditempuh seluruh elemen pemangku kewenangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di mana menggali aspirasi masyarakat menjadi landasan bagi anggota LPMK dalam mengusulkan berbagai program pembangunan yang disampaikan ke kelurahan.

Hasil tanggapan dari Armalis selaku ketua LPM Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi bahwa:

Terdiri dari 9 orang termasuk ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa seksi yang telah ditetapkan. Melaksanakan kegiatan rapat di tingkat RT dan masyarakat untuk menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Begitu juga dengan hasil tanggapan dari Eko Susilo selaku Lurah Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Yaitu sebanyak 9 orang. Yaitu melalui rapat dan turun langsung ke lapangan titik-titik yang menjadi skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Sementara dari tanggapan dari Mahyudin selaku sekretaris LPM Kelurahan Pangkalan Lesung menyatakan:

LPMK Pangkalan Lesung berjumlah 9 orang yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas di beberapa bidang (sosial, pembangunan, keagamaan, pendidikan, lingkungan, dan lainnya). LPMK menggali aspirasi masyarakat melalui rapat dan turun langsung di masyarakat dan diputuskan melalui rapat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Raisdar selaku bendahara LPM Kelurahan Pangkalan Lesung sebagai berikut:

Yaitu berjumlah 9 orang (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Jakfar selaku ketua RW di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut:

Berjumlah 9 orang. Menggali aspirasi masyarakat dengan mendatangi perkumpulan-perkumpulan masyarakat dan masyarakat secara individu (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Armalis Ahmad Jaiz selaku RT di Kelurahan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Berjumlah 9 orang. Turun langsung di masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Rizki Zulhernadi selaku pelaksana pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut ini:

Terdiri dari 9 orang yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Yaitu dengan cara mengadakan rapat dan turun langsung di masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Dede Iskandar selaku tenaga penyuluh di Kelurahan Pangkalan Lesung memberi informasi bahwa:

Jumlahnya 9 orang. Yaitu menggali aspirasi masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Berdasarkan tanggapan di atas menjelaskan bahwa menggali aspirasi masyarakat telah dilaksanakan oleh LMPK Kelurahan Pangkalan Lesung. Di mana dengan kekuatan 9 orang anggota, seluruhnya memiliki tugas dan fungsi masing-masing tetapi tetap menjurus kepada penggalangan aspirasi masyarakat agar terwujudnya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

b. Mencermati pembangunan paling yang dibutuhkan masyarakat

Mencermati pembangunan paling yang dibutuhkan masyarakat adalah langkah bersama yang dilakukan anggota LPMK untuk menetapkan jenis dan bentuk pembangunan yang paling dominan atau dibutuhkan masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Hasil tanggapan dari Armalis selaku ketua LPM Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi bahwa:

Mendengar informasi dari masyarakat dan ketua RT setempat melalui rapat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Begitu juga dengan hasil tanggapan dari Eko Susilo selaku Lurah Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Yaitu turun langsung ke lapangan dan melihat langsung ke lapangan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Sementara dari tanggapan dari Mahyudin selaku sekretaris LPM Kelurahan Pangkalan Lesung menyatakan:

Langkah yang dilakukan dengan melihat langsung kelapangan dan melihat seberapa penting yang diperlukan dan dibutuhkan dan untuk dijadikan skala prioritas (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Raisdar selaku bendahara LPM Kelurahan Pangkalan Lesung sebagai berikut:

Dengan melihat langsung kelapangan dan melihat seberapa penting yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat serta dijadikan skala prioritas (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Jakfar selaku ketua RW di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut:

Melihat langsung ke lapangan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Armalis Ahmad Jaiz selaku RT di Kelurahan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Yaitu dengan turun langsung ke lapangan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Rizki Zulhernadi selaku pelaksana pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut ini:

Dengan cara melihat langsung ke lapangan dan melihat seberapa penting yang diperlukan masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Dede Iskandar selaku tenaga penyuluh di Kelurahan Pangkalan Lesung memberi informasi bahwa:

Yaitu dengan melihat langsung ke lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Berdasarkan hasil tanggapan di atas dan pengamatan lapangan yang dilakukan terlihat bahwa anggota LPMK telah berperan dalam mencermati pembangunan yang paling dibutuhkan masyarakat. Di mana LPMK selalu turun langsung ke lapangan dan meminta pandangan atau keinginan masyarakat akan pembangunan, lalu dianalisis kebutuhan tersebut mampu atau tidak memenuhi keinginan masyarakat.

c. Memahami kebutuhan paling mendasari yang harus dipenuhi

Memahami kebutuhan paling mendasari yang harus dipenuhi adalah langkah yang ditunjukkan untuk memahami dari segala bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan dan menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hasil tanggapan dari Armalis selaku ketua LPM Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi bahwa:

Melihat lokasi yang diusulkan oleh masyarakat melalui rapat kerja RT, RW, dan masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Begitu juga dengan hasil tanggapan dari Eko Susilo selaku Lurah Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Mempelajari dan dibahas dalam forum rapat LPMK (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Sementara dari tanggapan dari Mahyudin selaku sekretaris LPM Kelurahan Pangkalan Lesung menyatakan:

Cara memahami dengan ikut atau turun langsung dan mempelajari lalu dibahas dalam forum rapat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Raisdar selaku bendahara LPM Kelurahan Pangkalan Lesung sebagai berikut:

Dengan ikut turun langsung dan mempelajari permasalahannya dan dibahas dalam forum rapat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Jakfar selaku ketua RW di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut:

Ikut turun langsung dan mempelajari dan membahas dalam forum rapat. (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Armalis Ahmad Jaiz selaku RT di Kelurahan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Ikut dalam forum rapat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Rizki Zulhernadi selaku pelaksana pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut ini:

Yaitu dengan cara terjun langsung dan mempelajari serta dibahas pada saat rapat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Dede Iskandar selaku tenaga penyuluh di Kelurahan Pangkalan Lesung memberi informasi bahwa:

Ikut dan turun langsung dalam forum rapat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa memahami kebutuhan paling mendasari yang harus dipenuhi adalah langkah yang dilakukan LPMK

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembangunan. Di mana saat ini untuk memenuhi kebutuhan tersebut LPMK telah mengusulkan dan disetujui untuk dilaksanakan berbagai jenis pembangunan yakni pembangunan jalan, pembukaan jalan baru, pembuatan drainase, dan pembangunan gedung serbaguna. Selain itu LPMK tidak hanya mengandalkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi LPMK memiliki dana sendiri yang bisa digunakan untuk membangun kelurahan berasal dari hasil usaha LPMK.

Dengan demikian jelaslah bahwa LPMK telah berperan dalam menjaga aspek dinamis dari kedudukannya. Di mana LPMK telah menggali aspirasi dari masyarakat, mencermati pembangunan paling dibutuhkan masyarakat, memahami kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi. Adanya peran ini diwujudkan dengan adanya berbagai jenis pembangunan fisik yang dilaksanakan di Kelurahan Pangkalan Lesung baik bersumber dari dana pemerintah maupun dari swadaya yang berasal dari hasil usaha LPMK.

3. Perilaku Sosial dan Fungsi Kedudukan

a. Menjalin komunikasi dengan perangkat masyarakat

Menjalin komunikasi dengan perangkat masyarakat adalah langkah yang selalu dijalani LPMK dalam menyerap dan menangani berbagai persoalan yang ada di masyarakat.

Hasil tanggapan dari Armalis selaku ketua LPM Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi bahwa:

LMPK Kelurahan Pangkalan Lesung selalu menampung aspirasi dari masyarakat dan apabila informasinya yang mendesak LMPK dan Lurah segera mencari solusi terhadap persoalan masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Begitu juga dengan hasil tanggapan dari Eko Susilo selaku Lurah Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Dengan mengadakan rapat rutin bulanan antara Lurah, LMPK, RW, RT dan tokoh-tokoh masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Sementara dari tanggapan dari Mahyudin selaku sekretaris LPM Kelurahan Pangkalan Lesung menyatakan:

Cara menjalin komunikasi yaitu dengan mengadakan rapat rutin bulanan dan melalui media sosial (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Raisdar selaku bendahara LPM Kelurahan Pangkalan Lesung sebagai berikut:

Dengan mengadakan rapat rutin bulanan dan melalui media sosial (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Jakfar selaku ketua RW di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut:

Dengan mengadakan rapat rutin bulanan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Armalis Ahmad Jaiz selaku RT di Kelurahan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Mengadakan rapat rutin bulanan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Rizki Zulhernadi selaku pelaksana pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut ini:

Yaitu dengan cara mengadakan rapat rutin dan melalui komunikasi media sosial (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Dede Iskandar selaku tenaga penyuluh di Kelurahan Pangkalan Lesung memberi informasi bahwa:

Mengadakan rapat rutin (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Berdasarkan tanggapan dan pengamatan yang telah dilakukan LMPK dalam menjalin komunikasi dengan perangkat masyarakat baik itu dengan tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, RW, pemuda, perempuan, dan lainnya dengan tujuan mendapatkan berbagai informasi yang memang dibutuhkan masyarakat dalam hal pembangunan.

b. Diskusi bersama masyarakat

Diskusi bersama masyarakat merupakan diskusi yang selalu dilakukan LMPK untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Di mana LMPK Kelurahan Pangkalan Lesung menjadi koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam rangka menyerap berbagai aspirasi.

Hasil tanggapan dari Armalis selaku ketua LPM Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi bahwa:

Diskusi yang dilakukan 1. Musrenbang terhadap usulan pembangunan di wilayah RT masing-masing. 2 Diskusi tentang sosial dan kemasyarakatan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Begitu juga dengan hasil tanggapan dari Eko Susilo selaku Lurah Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Yaitu diskusi pembangunan dan sosial masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Sementara dari tanggapan dari Mahyudin selaku sekretaris LPM Kelurahan Pangkalan Lesung menyatakan:

Bentuk diskusi dengan masyarakat yang dilakukan berupa diskusi pembangunan, kamtibmas, dan sosial masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Raisdar selaku bendahara LPM Kelurahan Pangkalan Lesung sebagai berikut:

Yaitu berupa diskusi pembangunan, kamtibmas, dan sosial masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Jakfar selaku ketua RW di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut:

Yaitu soal pembangunan dan sosial masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Armalis Ahmad Jaiz selaku RT di Kelurahan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Berupa diskusi pembangunan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Rizki Zulhernadi selaku pelaksana pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut ini:

Yaitu berupa diskusi pembangunan, kamtibmas, dan sosial masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Dede Iskandar selaku tenaga penyuluh di Kelurahan Pangkalan Lesung memberi informasi bahwa:

Diskusi pembangunan dan sosial masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa LMPK setiap bulannya telah menjalin atau mengadakan diskusi dengan seluruh elemen yang ada di Kelurahan Pangkalan Lesung. Beragam masalah dibahas pada diskusi yang diadakan LPMK tidak terkecuali mengenai pembangunan di kelurahan.

c. Mengkaji kelemahan dan kelebihan program pembangunan

Mengkaji kelemahan dan kelebihan program pembangunan merupakan evaluasi atas berbagai program yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Langkah ini menjadi penting mengingat pembangunan membutuhkan dana yang besar dan juga hanya diperoleh dalam kurun waktu tertentu saja.

Hasil tanggapan dari Armalis selaku ketua LPM Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi bahwa:

Melaksanakan survey di lapangan untuk melihat kebutuhan masyarakat atas usulan, layak atau tidaknya untuk dijadikan usulan prioritas (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Begitu juga dengan hasil tanggapan dari Eko Susilo selaku Lurah Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Dengan melihat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan tersebut (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Sementara dari tanggapan dari Mahyudin selaku sekretaris LPM Kelurahan Pangkalan Lesung menyatakan:

Langkah yang dilakukan yaitu dengan melihat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan tersebut (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Raisdar selaku bendahara LPM Kelurahan Pangkalan Lesung sebagai berikut:

Yaitu dengan melihat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Jakfar selaku ketua RW di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut:

Dengan melihat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Armalis Ahmad Jaiz selaku RT di Kelurahan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Yaitu dengan melihat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Rizki Zulhernadi selaku pelaksana pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut ini:

Yaitu dengan cara melihat partisipasi dari masyarakat dalam program pembangunan tersebut (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Dede Iskandar selaku tenaga penyuluh di Kelurahan Pangkalan Lesung memberi informasi bahwa:

Dengan melihat partisipasi masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa LPMK telah berperan dalam mengkaji kelemahan dan kelebihan program pembangunan merupakan evaluasi atas berbagai program yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Langkah ini menjadi penting mengingat pembangunan membutuhkan dana yang besar dan juga hanya diperoleh dalam kurun waktu tertentu saja.

d. Mencari solusi bersama

Mencari solusi bersama merupakan langkah yang harus dilakukan LPMK untuk mendapatkan berbagai program pembangunan yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dibutuhkan masyarakat serta mampu memenuhi harapan masyarakat akan pembangunan.

Hasil tanggapan dari Armalis selaku ketua LPM Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi bahwa:

Kegiatan pembangunan yang tidak bisa diakomodir oleh pihak kelurahan melalui dana DAU Pusat dan PPIDK, maka LPMK selalu membantu untuk melaksanakan pembangunan melalui anggaran LPMK, Pembangunan yang tepat sasaran dan melihat dari kebutuhan, LPMK Kelurahan Pangkalan Lesung mempunyai aset yang dijadikan sumber pendanaan yakni 6 Ha kebun kelapa sawit dan 4 buah Ruko yang disewakan yang merupakan

sumber pendanaan dalam mencari solusi pembangunan di kelurahan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Begitu juga dengan hasil tanggapan dari Eko Susilo selaku Lurah Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Yaitu terkait pembangunan dan sosial masyarakat dan dengan mengadakan musyawarah (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Sementara dari tanggapan dari Mahyudin selaku sekretaris LPM Kelurahan Pangkalan Lesung menyatakan:

Solusi yang pernah disampaikan terkait pembangunan dan kemasyarakatan, LPMK Pangkalan Lesung dan pemerintah kelurahan seiring sejalan dalam setiap kegiatan. Dengan mengadakan musyawarah dengan stakeholder dan membahas untuk mencari solusi terbaik (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Raisdar selaku bendahara LPM Kelurahan Pangkalan Lesung sebagai berikut:

Yaitu terkait pembangunan dan masyarakat, LMPK dan pemerintah kelurahan seiring sejalan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Mengadakan musyawarah dengan stakeholder dan membahas untuk mencari solusi terbaik (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Jakfar selaku ketua RW di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut:

Terkait pembangunan dan masyarakat. Dengan mengadakan musyawarah (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Armalis Ahmad Jaiz selaku RT di Kelurahan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Solusi terkait pembangunan dengan sosial masyarakat. Dengan mengadakan musyawarah (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Rizki Zulhernadi selaku pelaksana pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut ini:

Solusi terkait dengan pembangunan dan masyarakat. LPMK dan pemerintah kelurahan seiring sejalan dengan setiap kegiatan pembangunan. Mengadakan musyawarah dengan stakeholder dan membahas untuk mencari solusi terbaik (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Dede Iskandar selaku tenaga penyuluh di Kelurahan Pangkalan Lesung memberi informasi bahwa:

Solusi terkait pembangunan dan sosial masyarakat. Dengan mengadakan musyawarah (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Berdasarkan hasil tanggapan dan pengamatan yang telah dilaksanakan terlihat bahwa LMPK telah mencari solusi bersama dengan pemerintah kelurahan dan masyarakat kelurahan dalam hal program pembangunan. Langkah ini ditempuh dengan mengadakan diskusi bersama, menyerap aspirasi dilapangan dan sebagainya.

Dengan demikian dari indikator perilaku sosial dan fungsi kedudukan LPMK telah berperan dalam menjalankan tugasnya pada turut serta merencanakan pembangunan dengan memperhatikan komunikasi, melakukan diskusi,

mengevaluasi kelebihan dan kekurangan, dan mencari solusi bersama. Hasil ini tentunya mengindikasikan bahwa LMPK Pangkalan Kuras telah turut serta berperan dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai mitra dari Lurah.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa LMPK telah berperan dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung. Di mana peran-peran tersebut terlihat dari adanya penyusunan rencana pembangunan, telah adanya skala prioritas pembangunan, mengusulkan program pembangunan, menggali aspirasi masyarakat, menjalin komunikasi, dan sebagainya.

C. Hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Berbagai hambatan bisa saja ditemukan pada penelitian dalam melihat peran dari LMPK pada perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Di mana hambatan-hambatan tersebut menjadi batu sandungan untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang dibuthkan masyarakat.

Hasil tanggapan dari Armalis selaku ketua LPM Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi bahwa:

Hambatan dalam pengusulan skala prioritas hampir tidak menemui hambatan, yang menjadi masalah usulan pembangunan di tingkat Kabupaten usulan tersebut selalu tidak bisa diakomodir mengingat anggaran pendapatan daerah yang tidak mencukupi (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Begitu juga dengan hasil tanggapan dari Eko Susilo selaku Lurah Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Ketersediaan anggaran yang dialokasikan dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam menyampaikan kebutuhannya (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Sementara dari tanggapan dari Mahyudin selaku sekretaris LPM Kelurahan Pangkalan Lesung menyatakan:

Hambatannya ketersediaan anggaran dan masyarakat banyak yang kurang peduli dan tidak mau tahu (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Raisdar selaku bendahara LPM Kelurahan Pangkalan Lesung sebagai berikut:

Keterbatasan anggaran yang dimiliki dan Masyarakat banyak yang kurang peduli (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Jakfar selaku ketua RW di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut:

Ketersediaan anggaran dan masyarakat yang kurang peduli (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Armalis Ahmad Jaiz selaku RT di Kelurahan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Ketersediaan anggaran dan Masyarakat yang kurang peduli dalam menyampaikan kebutuhannya dan menjaga pembangunan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Rizki Zulhernadi selaku pelaksana pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut ini:

Ketersediaan anggaran dan Kurangnya kepedulian masyarakat (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Dede Iskandar selaku tenaga penyuluh di Kelurahan Pangkalan Lesung memberi informasi bahwa:

Ketebatasan anggaran yang tersedia di Kelurahan dan kepedulian masyarakat yang sangat kurang (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan para informan di atas sangat jelas tergambar bahwa faktor penghambat dari peran LMPK dalam perencanaan pembangunan adalah keterbatasan dana yang dislokasi untuk kelurahan Pangkalan Lesung, sehingga berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dan diusulkan tidak bisa terealisasi. Kemudian hambatan lainnya datang dari masyarakat dalam memberikan sumbangan pikiran dan juga menjaga pembangunan yang telah ada.

Begitu juga dengan hasil tanggapan dari Eko Susilo selaku Lurah Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Yaitu dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam membangun suatu pembangunan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Sementara dari tanggapan dari Mahyudin selaku sekretaris LPM Kelurahan Pangkalan Lesung menyatakan:

Saran yang diberikan yaitu kita hanya bisa membangun tapi untuk memelihara hasil pembangunan itu yang sangat sulit (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Jakfar selaku ketua RW di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut:

Selalu mendengar aspirasi masyarakat dalam pembangunan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Armalis Ahmad Jaiz selaku RT di Kelurahan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Dibutuhkan pemeliharaan pembangunan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Rizki Zulhernadi selaku pelaksana pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung diperoleh informasi berikut ini:

Kita hanya bisa membangun akan tetapi untuk dapat memelihara sangat sulit (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Hasil tanggapan dari Dede Iskandar selaku tenaga penyuluh di Kelurahan Pangkalan Lesung memberi informasi bahwa:

Adanya pemetaan kebutuhan masyarakat akan pembangunan (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Berbagai sumbangan saran yang bisa dijadikan pedoman perbaikan untuk kedepannya dalam menjaga pembangunan yang ada. Di mana dapat dikatakan bahwa pembangunan yang telah ada sepantasnya dirawat dan dijaga dengan baik, sehingga pembangunan dapat termanfaatkan dalam kurun waktu yang lama.

Kemudian melakukan pemetaan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu atau jangka waktu yang panjang, sehingga pembangunan yang dijalankan berkesinambungan dan pembangunan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa LMPK telah berperan dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Pangkalan Lesung. Di mana hasil ini dilihat dari indikator perangkat hak-hak dan kewajiban ini telah dilaksanakan oleh LMPK dalam memerankan fungsinya sebagai lembaga mitra dari lurah. Di mana LMPK Kelurahan Pangkalan Lesung telah berperan dalam menyusun rencana pembangunan, telah menetapkan skala prioritas program pembangunan, dan mengusulkan program pembangunan. LMPK telah berperan dalam menjaga indikator aspek dinamis dari kedudukannya. Di mana LMPK telah menggali aspirasi dari masyarakat, mencermati pembangunan paling dibutuhkan masyarakat, memahami kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi. Adanya peran ini diwujudkan dengan adanya berbagai jenis pembangunan fisik yang dilaksanakan di Kelurahan Pangkalan Lesung baik bersumber dari dana pemerintah maupun dari swadaya yang berasal dari hasil usaha LMPK. Indikator perilaku sosial dan fungsi kedudukan LMPK telah berperan dalam menjalankan tugasnya pada turut serta merencanakan pembangunan dengan memperhatikan komunikasi, melakukan diskusi, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan, dan mencari solusi bersama. Hasil ini tentunya mengindikasikan bahwa LMPK Pangkalan Kuras telah turut serta berperan dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai mitra dari Lurah.

Kemudian faktor penghambat dari peran LMPK dalam perencanaan pembangunan adalah keterbatasan dana yang dislokasi untuk kelurahan Pangkalan Lesung, sehingga berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dan diusulkan tidak bisa terealisasi. Kemudian hambatan lainnya datang dari masyarakat dalam memberikan sumbangan pikiran dan juga menjaga pembangunan yang telah ada.

B. Saran

Adapun saran yang bisa disampaikan untuk perbaikan pada masa mendatang dalam menjaga peran LMPK yakni:

1. Hendaknya LMPK memetakan permasalahan mengenai kebutuhan pembangunan di masyarakat, sehingga program pembangunan bisa berjalan dengan baik sesuai kebutuhan.
2. Hendaknya LMPK menjalani kerja sama dan komunikasi dengan seluruh elemen yang ada di masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam dan Mahendra Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alfa Riau.
- Budiardjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dunn, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- HP, Ismani, 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Malang, IKIP
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koentjaningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Akasara Baru
- Kuper, 2000. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Levinso dan Soekanto, 2009. *Peranan*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Musanef. 1992. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasyid, Muhammad Ryaas, 1997. *Makna Pemerintahan tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Rauf, Rahyunir, 2005. *Menuju RT/RW Yang Efektif*. Pekanbaru: Siasat UIR Pers.
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf. 2016. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sondang P, Siagian, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sitanggang, H. 1998. *Filsafat dan Etika Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syafiie, Kencana Inu, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Syafiie, Kencana Inu, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahab, Solichin Abdul.2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Impementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijaya H.A.W, 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dokumentasi.

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Keputusan Lurah Pangkalan Lesung Nomor: KPTS.410/K-PKL/2018/12 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pangkalan Lesung